

## Setelah ‘Perang’ Politik: Desember Jadi Ujian Berat Moderasi Beragama

**Jakarta** (Kabar Muda) – Bulan Desember 2025 menjadi momen penting bagi Indonesia. Setelah melewati siklus politik yang memanas, masyarakat kini dihadapkan pada ujian kedewasaan dalam menyikapi dua perayaan besar sekaligus: Natal dan pergantian tahun Masehi.

Kementerian Agama (Kemenag) melihat periode ini sebagai evaluasi langsung seberapa kuat program Moderasi Beragama telah mengakar di tengah masyarakat. Ujian Desember ini menguji dua aspek utama: toleransi beragama dan etika sosial.

Ujian Pertama: Toleransi Pasca-Pilkada.

Perayaan Natal pada 25 Desember menjadi indikator utama pemulihan kerukunan pasca-polarisasi. Sejarah mencatat, isu toleransi selalu sensitif di akhir tahun, khususnya terkait hukum mengucapkan selamat Natal atau penggunaan atribut.

Analisis menunjukkan, keberhasilan Moderasi Beragama diukur dari kemampuan masyarakat mayoritas untuk memprioritaskan kerukunan sosial (muamalah) di atas perbedaan keyakinan (akidah). Jika Natal berjalan damai, inklusif, dan saling menghormati, ini menandakan bahwa gejolak politik sudah mereda dan tidak merusak fondasi persaudaraan.

Ujian Kedua: Etika dan Konsumerisme Akhir Tahun

Ujian kedua muncul dari perayaan pergantian tahun. Meskipun bersifat budaya, perayaan ini sering memicu kritik etika dari berbagai tokoh agama.

Analisis fokus pada pergeseran makna akhir tahun. Seharusnya diisi dengan refleksi dan spiritualitas, kini didominasi oleh konsumerisme, pesta, dan hiburan yang dinilai bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam Moderasi Beragama. Kemenag mengimbau agar pergantian tahun diisi dengan kegiatan yang lebih positif dan reflektif, bukan sekadar hurai-hura.

FKUB dan Medsos Kunci Kestabilan

Di ruang digital, isu toleransi dan etika ini menjadi pemicu perdebatan. Tanpa literasi digital yang kuat, pesan-pesan damai mudah tenggelam oleh konten provokatif.

Lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pemerintah daerah berperan sebagai stabilisator utama. Mereka memastikan kebijakan untuk Natal berjalan inklusif, sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum.

Desember 2025 adalah momen penentuan. Keberhasilan masyarakat melewati dualisme perayaan ini dengan bijak, seimbang, dan toleran akan menjadi bukti nyata bahwa persaudaraan kebangsaan Indonesia jauh lebih kuat daripada perbedaan politik dan keyakinan.